

### Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menandatangani Nota Kesepahaman dengan BPK RI tentang kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data di Auditorium BPK RI.

**P**enyediaan informasi yang transparan dan akuntabel atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara adalah salah satu kewajiban tiap instansi pengelola anggaran negara, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan batas yang ditetapkan perundangan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat Nota Kesepahaman dengan Lemhannas RI, Kementerian Perindustrian RI, Dewan Ketahanan Nasional RI, Badan Intelijen Negara, dan Badan Standarisasi Nasional yang berisi pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Desember 2010 bertempat di Auditorium BPK RI. Nota Kesepahaman tersebut bertujuan mewujudkan hubungan kerjasama

### DAFTAR ISI

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Lemhannas RI..... 1
2. Forum Group Discussion: Pelibatan TNI dan Komponen Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..... 2
3. Kunjungan US-China Economic Security Review Commission ke Lemhannas RI..... 3
4. Peringatan Hari Ibu: "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk membangun Karakter Bangsa dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bermartabat"..... 4
5. Orientasi Kerja CPNS Lemhannas RI..... 5
6. Laporan kenaikan Pangkat Perwira Tinggi di TNIAD yang menjabat di Lemhannas RI..... 6
7. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Pemprov DKI Jakarta tentang Perbaikan Gedung Lemhannas RI.... 7
8. Sertijab Eselon III dan IV di Lemhannas RI..... 7
9. Pertemuan Gubernur Lemhannas RI dengan UKP4..... 8
10. Penetapan Kinerja Lemhannas RI..... 9
11. Rapat Pantukhir Calon Peserta PPSA XVII..... 10
12. Upacara Bendera Tujuh Belasan di Lemhannas RI..... 11
13. Pembekalan Bahasa Indonesia kepada Calon Peserta PPRA XLVI Tahun 2011..... 12

pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bagi Lemhannas RI, hal tersebut adalah sebuah kepercayaan BPK RI kepada Lemhannas RI dalam memenuhi kebutuhan informasi elektronik atas pengelolaan keuangan Lemhannas RI.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, maka Lemhannas RI memiliki kewajiban untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi S.H. berharap adanya koordinasi dan bimbingan BPK RI baik dalam konteks pelaksanaan audit maupun melalui rapat-rapat koordinasi agar dapat terpenuhinya materi Nota Kesepahaman secara berdayaguna dan berhasilguna.



## FORUM GROUP DISCUSSION: PELIBATAN TNI DAN KOMPONEN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI WILAYAH NKRI



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR.. Muladi, S.H dan Menteri Pertahanan, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D. sebagai narasumber pada acara Forum Group Discussion Kemenko Polhukam

**A**cara *Forum Group Discussion* yang dilaksanakan oleh Kemko Polhukam, mengangkat tema "Pelibatan TNI dan Komponen Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme di Wilayah NKRI" di Kemko Polhukam pada tanggal 2 Desember 2010.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., sebagai narasumber memaparkan tentang "*Legalitas dan Sinergitas (TNI-Polri) Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Penanggulangan/ Penindakan Aksi Terorisme dan Aksi-aksi Kelompok Militer atau Radikal Bersenjata Lainnya dalam Perspektif Keamanan Nasional yang Utuh dan Menyeluruh*". Dalam paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa gerakan reformasi 1998 telah menegaskan kembali nilai-nilai atau asas-asas dasar demokrasi secara konstitusional, seperti *check and balance*, prinsip transparansi, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan *responsive*, supremasi hukum, otonomi daerah, kebebasan media massa, promosi dan perlindungan HAM, berkembangnya masyarakat

madani serta prinsip kontrol sipil terhadap militer.

Penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi tersurat dan tersirat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang diundangkan di era reformasi, seperti pada Pasal 30 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Pada kesempatan tersebut Lemhannas RI merekomendasikan agar materi UU No. 23/PRP/1959 tentang keadaan bahaya diamandemen dengan perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan dimasukkan dalam UU Keamanan Nasional yang akan datang. Bahkan Lemhannas RI memandang perlu dicantumkannya kondisi darurat bencana dan segera dibentuknya Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang dipimpin langsung oleh presiden RI. DKN ini diharapkan sebagai suatu forum yang membantu atau memberikan masukan kepada presiden dalam menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan keamanan nasional.



# KUNJUNGAN DELEGASI US-CHINA ECONOMIC SECURITY REVIEW COMMISSION (USCC) KE LEMHANNAS RI



Penyambutan rombongan US-China Economic Security Review Commission (USCC) oleh Brigjen TNI Irwan Kusnadi, S.Sos, M.Sc, dan Karo Kerma, Brigjen TNI Danu Nawawi, S.Sos.



Rombongan US-China Economic Security Review Commission (USCC) diterima Marsda TNI Surya Dharma, SIP sebelum melakukan *Courtesy Call* kepada Gubernur Lemhannas RI

**K**etua Rombongan US-China Economic Security Review Commission (USCC) beserta 9 (Sembilan) orang anggota Delegasi USCC melaksanakan *Courtesy Call* kepada Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. pada tanggal 17 Desember 2010 di Ruang Kerja Gubernur.

Pada acara *Courtesy Call* tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. didampingi oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Diplomasi, Marsda TNI Surya Dharma, SIP dan Karo Humas Lemhannas RI, Brigadir Jenderal TNI Irwan Kusnadi, S.Sos, M.Sc, dan Karo Kerma, Brigjen TNI Danu Nawawi, S.Sos.

Dalam *Courtesy Call* tersebut, selain membicarakan tentang Lemhannas RI dan USCC juga membahas beberapa *issue* terkait dengan keamanan dan ekonomi. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Amerika Serikat harus memandang Indonesia sebagai Negara yang patut diperhitungkan ditengah dominasi China yang semakin kuat baik secara ekonomi maupun politik, sehingga sebagai sesama negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus menjalin dan meningkatkan kerjasamanya dalam berbagai bidang, terutama bidang keamanan dan ekonomi.

Gubernur Lemhannas RI mengharapkan agar Amerika Serikat dapat memberikan bantuan dalam bidang sistem persenjataan (*alutsista*) dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pengamanan keutuhan wilayahnya. Sebaliknya juga Amerika Serikat mengharapkan Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat bersatu dan bekerja sama dalam menolak ancaman yang dapat mengganggu demokrasi yang telah berlangsung dengan baik selama ini.



*Courtesy Call* Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. dengan Ketua Rombongan, Daniel M. Slane dan 9 Anggota Delegasi USCC lainnya di Ruang Kerja Gubernur.

**PERINGATAN HARI IBU:****"KESETARAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN BERMARTABAT"**

**P**eringatan Hari Ibu yang setiap tahun diperingati pada tanggal 22 Desember, berupaya untuk terus mengingatkan kepada kita semua akan perjuangan kaum perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan bangsa. Ikrar para pejuang pada Kongres Perempuan Indonesia (KPI) pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta merupakan tonggak sejarah puncak perjuangan kaum perempuan, dan pada Kongres Perempuan yang ketiga tahun 1938 ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember dijadikan hari nasional yang diperingati setiap tahun oleh segenap bangsa Indonesia.

Lemhannas RI pada tanggal 22 Desember 2010 menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ibu ke-82 yang diikuti oleh segenap anggota Lemhannas RI. Selama kurun waktu 82 tahun tersebut telah banyak kemajuan yang dicapai perempuan Indonesia dalam peran dan pengabdian, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Perempuan Indonesia telah berkiprah di berbagai bidang pembangunan sebagai agen perubahan dan duduk di dalam jabatan-jabatan strategis, dan dapat menikmati hasil pembangunan bersama-sama dengan kaum laki-laki di seluruh wilayah Indonesia.

Upacara peringatan hari ibu tersebut mengangkat tema "**Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk Membangun Karakter Bangsa dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bermartabat**". Dalam sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Irjen Pol Moch. Rasyid Ridho, SH., MH., disampaikan bahwa makna dari tema Hari Ibu tersebut adalah nilai-nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yang merupakan dasar pembentukan karakter dan budi pekerti untuk mencintai tanah air dan bangsa, memegang teguh rasa nasionalisme, dan wawasan kebangsaan yang hakiki. Sejalan dengan itu,

maka upaya pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan perlu dimulai sejak dini dari dalam keluarga, dilanjutkan ke sekolah dan lingkungan masyarakat. Penghargaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, umat beragama, ras dan antar golongan, perlu dikedepankan dan diperkuat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Adapun kata "sehat" yang dimasukkan ke dalam tema kali ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesehatan maka tidak mungkin bangsa kita dapat melaksanakan pembangunan, dan juga mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Millenium bidang kesehatan pada tahun 2015. Upaya-upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradaban bangsa juga harus menjadi agenda utama penegakan hak azasi perempuan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan agar setara dengan laki-laki memerlukan peningkatan koordinasi, sinergisitas dan keterpaduan, baik antar kementerian/lembaga, kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Agar perjuangan kita tidak akan menjadi sia-sia dan semakin kokoh di masa mendatang, maka kita harus berpegang teguh pada 4 pilar dasar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.



*Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-82 di Lemhannas RI pada tanggal 22 Desember 2010*



# ORIENTASI KERJA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL T.A. 2010 LEMHANNAS RI



*Pembukaan Orientasi Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Lemhannas RI oleh Brigadir Jenderal Polisi DR. H. M. Said Saile, M.Si. di Gd. Astagatra Lt. III Timur*

Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI, Brigjen Pol DR. H. M. Said Saile, M.Si. membuka acara Orientasi Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lemhannas RI TA. 2010 pada tanggal 3 Januari 2011 di Gd. Astagatra Lt.III Timur. Acara yang berlangsung selama lima hari tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Kolonel Laut (K) Nurheryanto, SE., Kepala Bagian Tata Usaha, Ir. Ita Endah Pratiwi, MA. Kepala Bagian Rumah Tangga, Kolonel Inf Endang Nirwan, serta pejabat di lingkungan Biro Umum Settama Lemhannas RI.

Orientasi kerja ini dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada seluruh CPNS yang berjumlah 21 orang di lingkungan Lemhannas RI tentang susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Lemhannas RI serta hak dan kewajiban pegawai negeri sipil sebagai seorang aparatur negara, sebelum mendapatkan penugasan sesuai kompetensi masing-masing. Dengan pembekalan selama 5 hari yang dilaksanakan tersebut dan pembinaan personil yang berkelanjutan, diharapkan mampu menjawab dan memenuhi

kebutuhan formasi di Lemhannas RI.

Kepala Biro Umum dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada para peserta, dapat melaksanakan rangkaian orientasi kerja ini dengan baik, serta dapat mengaplikasikannya pada pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Pelaksanaan tersebut juga dilandasi dengan berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri sebagai kode etik pegawai negeri sipil, setia dan taat pada NKRI dan UUD 1945 dan bukan sekedar janji, namun juga dengan bukti.

Para pegawai baru tersebut diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan Lemhannas RI yang sedang mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan Reformasi Birokrasi. Orientasi kerja CPNS Lemhannas tersebut ditutup oleh Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI, Brigadir Jenderal Polisi DR. H. M. Said Saile, M.Si., pada tanggal 7 Januari 2011 di Gedung Astagatra Lt. III Timur Lemhannas RI.



*21 Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Orientasi Kerja di Gd. Astagatra Lt. III Timur*

# LAPORAN KENAIKAN PANGKAT PERWIRA TINGGI TNI AD YANG BERTUGAS DI LEMHANNAS RI

**S**ebanyak 21 Perwira Tinggi TNI AD yang terdiri dari 7 perwira berpangkat Mayor Jenderal dan 14 perwira berpangkat Brigadir Jenderal melaporkan kenaikan pangkat mereka kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta di Mabasad pada hari Jumat, 31 Desember 2010. Diantara 21 Perwira Tinggi TNI AD tersebut, 7 Perwira Tinggi menjabat di Lemhannas RI.

Kenaikan pangkat adalah sebuah kehormatan yang hanya diberikan pada prajurit yang mampu menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela, dan pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kenaikan pangkat ini juga merupakan anugerah dan kepercayaan dari pimpinan TNI, bangsa, negara, dan juga merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, perwira yang mendapat kenaikan pangkat, memiliki kewajiban moral untuk dapat memberikan karya pengabdian berkualitas.

Kasad berharap, kenaikan pangkat tersebut dapat menjadi pendorong semangat untuk menyongsong tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Berikut adalah Perwira Tinggi TNI AD yang memperoleh kenaikan pangkat dan bertugas di Lemhannas RI, yaitu:

1. Mayjen TNI Bambang Sutrisno (T.A. Pengajar Bid. Geostrat dan Tannas Lemhannas RI);
2. Mayjen TNI DR. Albiker Hutabarat, S.IP, S.T., M.M. (T.A. Pengkaji Bid. Kepemimpinan Lemhannas RI);
3. Mayjen TNI Kusworo, M.Sc (T.A. Pengajar Bid. Iptek Lemhannas RI);
4. Mayjen TNI Osaka Meliala (T.A. Pengkaji Bid. Tannas Lemhannas RI);
5. Mayjen TNI S. Widjonarko, S.Sos, M.M., M.Sc. (T.A. Pengajar Bid. Padnas Lemhannas RI);
6. Brigjen TNI Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc. (Karo Humas Settama Lemhannas RI);
7. Brigjen TNI Asis Wanto (Dirjian Ekonomi Debidjianstrat Lemhannas RI).



*Pembacaan Ikrar Perwira Tinggi pada pelaporan kenaikan pangkat Perwira Tinggi TNI AD*



*Perwira Tinggi TNI berpangkat Brigadir Jenderal pada pelaporan kenaikan pangkat kepada KASAD*



*Acara pelaporan kenaikan pangkat Perwira Tinggi TNI kepada KASAD*



## PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMHANNAS RI DENGAN PEMPROV DKI TENTANG PERBAIKAN GEDUNG LEMHANNAS RI

**R**abu, 12 Januari 2011 telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang perbaikan Gedung Lemhannas RI di Ruang Nusantara I, Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh dua pihak yang bersepakat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pihak yang bersepakat yaitu Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. sebagai pihak pertama, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DR. Ing. Fauzi Bowo sebagai pihak kedua. Sebagai saksi, yaitu: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Kamal Sofyan Nasution, SH, MH., dan Wakil Presiden Direktur PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, TBK., Ir. Sutopo Kristanto, M.M.

Pembangunan Gedung Pemprov DKI yang dilaksanakan sejak tahun 2010 berakibat pada rusaknya bangunan di Lemhannas RI. Kedua pihak telah sepakat, kerusakan yang terjadi di Lemhannas RI ditanggung oleh Pemprov DKI.

Dengan adanya dokumen Nota Kesepahaman tersebut diharapkan adanya tindak lanjut secara konkrit perbaikan-perbaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk segera melakukan perbaikan Gedung Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. mengharapkan perbaikan Gedung Lemhannas RI yang dilakukan melalui perbaikan secara arsitektural, struktural secara permanen, dan memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kerja.



*Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Perbaikan Gedung Lemhannas RI oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. di Ruang Nusantara I Lemhannas RI*

## SERTIJAB ESELON III DAN IV DI LEMHANNAS RI

**L**emhannas RI, tanggal 14 Januari 2011 menyelenggarakan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pelantikan pejabat eselon III sebanyak 3 orang, dan eselon IV 6 orang di ruang Nusantara Gd. Trigatra. Upacara tersebut



*Pengambilan sumpah jabatan pada acara serah terima jabatan dan pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lemhannas RI*

dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H., dan dihadiri oleh para pejabat Lemhannas RI.

Serah terima Jabatan atau mutasi jabatan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang biasa terjadi di lingkungan birokrasi, dilaksanakan sebagai wujud dari proses pembinaan organisasi dan personil yang senantiasa dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika yang ada. Gubernur Lemhannas RI berharap, regenerasi yang dilakukan tersebut dapat mengarah pada pembaharuan yang positif, dan sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan, serta sasaran reformasi birokrasi.

Perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kinerja ini sangat ditentukan oleh tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi dari pejabat, serta didukung oleh kemampuan serta kreativitas dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

Di akhir sambutan, Gubernur Lemhannas RI mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Kemudian, juga mengingatkan bahwa jabatan baru yang diemban merupakan kepercayaan dan amanah, sekaligus kehormatan yang diberikan bangsa dan negara.

# PERTEMUAN GUBERNUR LEMHANNAS RI DAN TIM ADHOC LABKURTANNAS DENGAN UKP4

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., beserta Tim Adhoc Labkurtannas mengadakan pertemuan dengan Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto pada tanggal 12 Januari 2010 di Ruang Rapat Labkurtannas, Gedung Astagatra Lt. 8 Lemhannas RI.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI disampaikan bahwa saat ini sedang dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI. Dalam rangka mendukung kesuksesan program tersebut, Lemhannas RI kini melakukan reformasi birokrasi dan revitalisasi kelembagaan dengan berbasis pada teknologi tinggi/ *Information Communication Technology* (ICT).

Adapun 7 (tujuh) bidang yang akan direvitalisasi yaitu: *e-Office*, *e-Procurement*, *e-Learning*, *e-Library*, *e-Evaluation*, Peningkatan *Capacity Building*, dan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Labkurtannas yang dikembangkan sejak tahun 2007 dengan fungsi untuk mengembangkan sistem pengukuran ketahanan nasional dan model simulasi



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. membuka pertemuan tentang Labkurtannas dengan UKP4 di Ruang rapat Labkurtannas, Gd. Astagatra Lt. 8

yang mampu memantau dan menganalisis ketahanan nasional, dan ketahanan nasional di daerah, serta mampu memprediksi dampak dari suatu kebijakan publik terhadap ketahanan nasional tersebut.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki sistem informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak dari dinamika lingkungan strategis dan kebijakan publik terhadap ketahanan nasional. Oleh karena itu, Lemhannas RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban untuk membangun sebuah sistem informasi tersebut dengan melibatkan banyak pakar dan pemangku kepentingan dari luar Lemhannas RI. Selain hal tersebut juga melibatkan institusi-institusi terkait dari 33 provinsi seluruh Indonesia untuk pembangunan sistem dan pengisian data.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa hasil pengukuran dan simulasi nantinya akan disusun dalam buku profil tentang ketahanan nasional dan ketahanan nasional di daerah. Saat ini, telah dihasilkan satu buku tentang profil ketahanan nasional dan 33 buku tentang profil ketahanan nasional di daerah (provinsi).



Konsep Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas) yang digunakan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang dikembangkan oleh Lemhannas RI



# UPACARA PENYERAHAN PENETAPAN KINERJA LEMHANNAS RI

**G**ubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memimpin Upacara Penyerahan Penetapan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2011 pada 13 Januari 2011 di Ruang Nusantara. Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan, bahwa dari aspek daya serap T.A. 2010 mengalami peningkatan dibanding T.A. 2009, akan tetapi masih perlu adanya evaluasi menyeluruh dari hasil yang dicapai untuk perbaikan dan penyempurnaan ke arah lebih baik, termasuk dalam hal akurasi perencanaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan kinerja tersebut adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil yang akan menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap unit kerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan anggaran, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 yang menyebutkan, bahwa setiap satuan kerja dan unit kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Sasaran yang diharapkan dengan adanya akuntabilitas kinerja dapat menjadikan Lemhannas RI sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, mewujudkan transparansi lembaga, mewujudkan partisipasi pelaksanaan program dan anggaran, dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada Lemhannas RI.

Lakip Lemhannas RI tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan signifikan yaitu naik dari peringkat 70 menjadi 15 dari 74 instansi pemerintah yang dinilai oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Besar harapan Gubernur Lemhannas RI, bahwa dengan adanya acara ini akuntabilitas kinerja Lemhannas RI terus meningkat.

Gubernur menyampaikan penekanan dalam sambutan tersebut, yaitu:

**Pertama**, sedapat mungkin Lemhannas RI menghindari *crash program* yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang telah

direncanakan.

**Kedua**, para unit kerja diminta mematuhi jadwal pelaksanaan program dan jadwal penarikan anggaran sesuai Juklak Lemhannas RI, Nomor : SKEP/01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011.

**Ketiga**, ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal merupakan poin penting dalam penilaian akurasi perencanaan oleh Kementerian Keuangan.

**Keempat**, bagi unit kerja yang mempunyai program prioritas tetapi masih belum masuk dalam DIPA T.A. 2011 agar diajukan kembali pada T.A. 2012.

**Kelima**, maksimalkan koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam pelaksanaan program dan anggaran.

**Keenam**, program dan anggaran T.A. 2011 dapat dilaksanakan dengan kesungguhan hati, tulus ikhlas, dan jauhkan dari kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan lembaga, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan dari pemerintah bisa dipertahankan.

**Ketujuh**, berkenaan dengan rencana tahun anggaran 2012, dalam penyusunan program dan anggaran para unit kerja untuk tetap mengacu pada Renstra Lemhannas RI tahun 2010-2014, visi, misi Lemhannas RI dan perkembangan lingkungan strategis.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada para Deputi, Inspektoral, serta Kepala Biro Setmana Lemhannas RI

## RAPAT PANTUKHIR CALON PESERTA PPSA XVII



*Rapat penentuan akhir calon peserta PPSA XVII di Ruang rapat Nusantara I, Gd. Trigatra*

**P**anitia Penentu Akhir calon peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lemhannas RI Tahun 2011, menyelenggarakan rapat penentuan akhir pada tanggal 13 Januari 2011 di Ruang Rapat Nusantara I, Gd. Trigatra. Rapat dihadiri oleh para pejabat Lemhannas RI maupun pejabat dari luar Lemhannas RI.

PPSA merupakan realisasi dan implementasi dari salah satu tugas Lemhannas RI yang tertuang pada peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2006 tentang Lemhannas RI, yaitu *"Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal"*.

Rapat diawali dengan laporan dari Plt. Sekretaris Utama, Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. sebagai Ketua Panitia Penentu Akhir calon peserta PPSA XVII

Lemhannas RI tahun 2011. Laporan tersebut mengenai hasil rapat Panitia Seleksi Administrasi calon peserta PPSA XVII Lemhannas RI Tahun 2011 pada tanggal 1 Desember 2010, yaitu calon peserta yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 86 orang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi sebanyak 42 orang.

Rapat yang diselenggarakan merupakan sebagai penentu akhir siapa yang akan menjadi peserta PPSA yang berjumlah 80 orang peserta. Calon peserta PPSA XVII Lemhannas RI tahun 2011 tersebut berasal dari berbagai komponen masyarakat, yaitu dari suprastruktur, infrastruktur, maupun substruktur, bahkan dari partai politik dan guru besar dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Komposisi tersebut memiliki nilai strategis dalam rangka memperluas wawasan dan membentuk *networking* bagi peserta program pendidikan tersebut.



## UPACARA BENDERA TUJUH BELASAN DI LEMHANNAS RI

Upacara Bendera Tujuh Belas dilaksanakan di Halaman Tengah Lemhannas RI pada hari Senin, 17 Januari 2011. Selaku Inspektur Upacaranya adalah Gubernur Lemhannas RI, dan seluruh personil Lemhannas RI sebagai peserta upacara.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. dalam sambutan tanpa teks menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pergantian pimpinan Lemhannas RI dan pelantikannya direncanakan dilaksanakan di Istana Negara, sedangkan Sertijab dan pisah sambut dilaksanakan di Lemhannas RI.

Prof. DR. Muladi, S.H., juga menyampaikan pencapaian yang telah diraih oleh Lemhannas RI selama dibawah kepemimpinannya. Beberapa pencapaian yang diraih adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Revitalisasi dan Restrukturisasi Lemhannas RI menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) khusus, antara lain jabatan Gubernur Lemhannas RI setara dengan Menteri

**Kedua**, Meningkatnya apresiasi masyarakat untuk mengikuti PPRA/PPSA dan sejak Tahun 2009 Lemhannas RI telah menerima peserta pendidikan dari negara-negara sahabat

**Ketiga**, Mengoperasikan *Information and Communication Technology* (ICT) mencakup: *e-Learning*,



*Penghormatan umum kepada Inspektur upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara*



*Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh peserta upacara*

*e-Evaluation, e-Library, e-Procurement, e-Simpeg dengan Finger Print System, e-Office, e-Board, e-Mail, e-Kurtannas, Website Lemhannas.*

**Keempat**, Pembangunan fisik di Lemhannas RI, pada APBN-P Tahun 2010 membangun tahap pertama *messing* sebanyak 140 kamar standar bintang lima bagi peserta pendidikan dilengkapi dengan *auditorium theateristik* juga telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman Lemhannas RI dengan Pemprov DKI tentang perbaikan gedung Lemhannas RI.

**Kelima**, Mendapat apresiasi dari ketua UKP4, Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto terhadap Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI yang berfungsi memberikan informasi terukur kepada pimpinan nasional tentang kondisi Ketahanan Nasional di 33 Provinsi secara berkala dan sekaligus sebagai masukan berupa *Policy Recommendation* dan *Early Warning System*, bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**Keenam**, Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK RI yaitu sebanyak 3 kali berturut-turut Tahun 2007, 2008 dan 2009.

**Ketujuh**, Meraih penghargaan dari Pemerintah Indonesia 3 tahun berturut-turut atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan.

# PEMBEKALAN BAHASA INDONESIA KEPADA CALON PESERTA MANCANEGERA PPRA XLVI TAHUN 2011



*Kegiatan belajar para calon peserta mancanegara Program pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011 di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan.*

*dokumentasi pusbahasa*

**C**alon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI dari Mancanegara mengikuti kursus Bahasa Indonesia di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Kursus Bahasa Indonesia yang dilaksanakan, mulai bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai sehingga para calon peserta PPRA XLVI dari mancanegara dapat mengikuti proses belajar-mengajar dengan baik di Lemhannas RI.

Calon peserta mancanegara yang mengikuti kursus berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu:

1. Kolonel AD Kharaoubi Kamel (Aljazair);
2. Brigjen AU Firoz Hasan (Bangladesh);
3. Kolonel AL Xu Shaobin (China);
4. Kombes Polisi Sakeasi Tamani (Fiji);
5. Brigjen AD Devraj Anbu Ysm, SM (India);
6. Kolonel AU Sum Samnang (Kamboja);
7. Brigjen AD Mussaraf Nawaj Malik (Pakistan);
8. Mayjen Awjc De Silva (Srilangka);
9. Kapten AU Sompong Khaonual (Thailand);
10. Brigjen AU Walib S. Alkhrebshe (Yordania).

**Pengarah :** *Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.*

**Penanggung Jawab :** *Brigjen TNI Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc., Redaktur :* *Megawarni Simamora, S.E, M.M*

**Penyunting/Editor :** *Kolonel Laut (P) Estu Prabowo, Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M.,*

**Redaktur Pelaksana :** *Linda Purnamasari S.Sos., Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.*

**Desain Grafis & Fotografer :** *Esih Sukaesih, Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Bambang Iman Aryanto, S.T.*

**Sekretariat :** *Gatot, Arief Ardiyanto, S.Sn., Indiah Winarni*

**Distribusi :** *Letkol Inf. Sumurung, Peltu (K) Fransisca M, Letda Cba Supriyono, Supriyadi*

**Alamat Redaksi :** *Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)*

*Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,*

*Website <http://www.lemhannas.go.id>*